

CORPORATE GOVERNANCE DAN ETNISITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Trudy Maryona Nussy

Politeknik Negeri Ambon
Jl. Ir. Putuhena Wailela Ambon, 97234.

Abstract

The objective of research was to examine the effect of corporate governance and ethnicity on the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). Corporate governance mechanisms used in this research were managerial ownership, institutional ownership, independent commissioner, and audit committee. Research was conducted against the companies listed in Indonesia Stock Exchange in the period of 2005 and 2011. Sampling technique was purposive sampling. Hypothesis testing was conducted by independent sample t-test and multiple regressions. Test and analysis were carried out separately in 2005 and 2011. The result of research indicated that there was a difference in the CSR disclosure rate. The use of CSR in Indonesia in 2011 was higher than that in 2005. The managerial ownership and the institutional ownership influenced CSR disclosure in 2005, while independent commissioner, audit committee and ethnicity did not influence CSR disclosure in 2005. The disclosure of CSR in 2011 was affected by institutional ownership, independent ownership and audit committee. The managerial ownership and ethnicity did not influence CSR disclosure in this year.

Key words: *audit committee, CSR disclosure, ethnicity, independent commissioner, institutional ownership, managerial ownership*

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan proses pengomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray *et al.*, 1988). Perusahaan dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan pelaksanaan CSR melalui pengungkapannya dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan (Haniffa & Cooke, 2005). Dengan demikian pengungkapan CSR dilakukan agar bentuk kontribusi yang telah dilaksanakan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia kemudian berkembang dengan dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dikeluarkannya peraturan terhadap praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74 serta UU Penanaman Modal no. 25 tahun 2007 yang mengatur setiap penanaman modal untuk ikut serta dalam melaksanakan CSR. Pelaksanaan kegiatan CSR juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diantaranya pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, pinjaman modal, beasiswa, penyuluhan hukum, dan penguatan kearifan lokal (Setianto, 2012).

Korespondensi dengan Penulis:

Trudy Maryona Nussy: Telp. +62 911 322 609; Fax. +62 911 343 591

E-mail: trudy.maryona@gmail.com

Pengungkapan adalah sebuah aktivitas akuntansi yang melibatkan interaksi antara dua sumber daya, yakni manusia dan non manusia atau teknik (Perera, 1994 dalam Haniffa & Cooke, 2005) sehingga penelitian dalam bidang ini dapat pula memasukkan faktor-faktor budaya dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Lebih lanjut dalam Haniffa & Cooke (2005) dinyatakan bahwa dimasukkannya etnis (proksi untuk budaya) dari para pengambil keputusan di dalam maupun di luar organisasi adalah penting di beberapa negara karena tradisi sebuah bangsa yang ditanamkan dalam diri seseorang dapat membantu menjelaskan mengapa sebuah keputusan diambil.

Penelitian yang dilakukan Haniffa & Cooke (2005) menunjukkan dewan direksi yang didominasi etnis melayu berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dijelaskan bahwa menjadi kelompok yang disukai pemerintah, etnis melayu dituntut mengadopsi strategi legitimasi untuk mengubah persepsi dan mengalihkan perhatian *stakeholder* sehingga hubungan baik dengan pemerintah tetap terjaga melalui pengungkapan CSR.

Menurut Utama (2007) praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *good corporate governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholdernya*, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholder* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris perbedaan tingkat pengungkapan CSR periode 2005 dan 2011, pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit serta etnis dewan direksi terhadap pengungkapan CSR.

Dalam penelitiannya Said *et al.* (2009) mengambil delapan karakteristik *corporate governance*, yaitu ukuran dewan, independensi dewan, dualitas CEO, independensi komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemili-

kan asing, dan kepemilikan pemerintah, yang diuji hubungannya dengan pengungkapan CSR. Hasil penelitian Said *et al.* (2009) menunjukkan hanya dua variabel yang berpengaruh terhadap CSR *disclosure*, yaitu kepemilikan oleh pemerintah dan independensi komite audit. Keduanya positif berkorelasi dengan tingkat pengungkapan CSR.

Rawi & Muchlish (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap CSR. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, perusahaan yang mempunyai kepemilikan saham manajemen yang tinggi akan lebih banyak melakukan aktivitas sosial dan lingkungan karena mereka menganggap bahwa masyarakat eksternal memperhatikan kondisi lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan. Hal ini bertentangan dengan penelitian Huafang & Jianguo (2007) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap CSR.

Hasil penelitian Machmud & Djakman (2008), serta Rawi & Muchlis (2010) membuktikan bahwa kepemilikan institusi pada perusahaan di Indonesia tidak memengaruhi luas pengungkapan CSR. Selain itu, hasil ini tidak mendukung teori *stakeholder* karena dalam *stakeholder theory* dinyatakan bahwa *stakeholder* merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang dapat memengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Rawi & Muchlis 2010).

Sembiring (2005) dalam penelitiannya membuktikan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, yang berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, pengungkapan CSR yang dibuat perusahaan akan semakin luas. Hubungan antara komisaris independen dengan pengungkapan CSR dalam beberapa penelitian membuktikan adanya ketidakkonsistenan hasil. Said *et al.* (2009) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh Huafang & Jianguo (2007) menunjuk-

kan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung tercapainya pelaksanaan *good corporate governance* oleh perusahaan, salah satunya adalah komite audit yang memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI 2002). Ho & Wong (2001) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Semakin besar ukuran komite audit, maka perannya dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan semakin luas sehingga menjamin transparansi pengungkapan sukarela.

HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian empiris, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- H₁: terdapat perbedaan dalam tingkat pengungkapan CSR periode 2005 dan 2011.
- H₂: kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
- H₃: kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
- H₄: dewan komisaris independen berpengaruh terhadap CSR.
- H₅: komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
- H₆: etnis dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

METODE

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2005 dan 2011. Pemerintah mendukung praktik dan pengungkapan CSR melalui UU

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 sehingga penelitian ini menguji praktik pengungkapan CSR dalam dua periode waktu yang berbeda.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *judgment sampling* yakni *purposive sampling* dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Hartono, 2007) yaitu pertama memiliki tahun buku yang berakhir 31 Desember dan memublikasikan laporan tahunan dalam satuan mata uang rupiah, kedua perusahaan tersebut melaporkan pengungkapan CSR, ketiga memiliki data mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit.

Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSRI dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan 0 jika tidak. Instrumen pengukuran dalam *checklist* yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan Sembiring (2005). Rumus perhitungan CSRI (Haniffa & Cooke, 2005) adalah:

$$CSR_{ij} = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSR_{ij} : Corporate Social Responsibility Index perusahaan j

n_j : jumlah item untuk perusahaan j, n_j < 78

X_{ij} : 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan

Dengan demikian, 0 < CSR_{ij} < 1

Pada penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan persentase kepemilikan saham dewan direksi dan dewan komisaris dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institu-

sional diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, dan institusi lain dibagi dengan total jumlah saham beredar. Dewan komisaris independen diukur dengan persentase jumlah komisaris independen dari jumlah anggota dewan komisaris. Komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit di setiap perusahaan. Etnisitas dalam penelitian ini merupakan variabel *dummy*.

Variabel kontrol juga digunakan dalam penelitian ini yakni *size*, profitabilitas, *leverage*, dan jenis industri. *Size* diukur dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran profitabilitas menggunakan ROA yakni laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. *Leverage* diperoleh dari total utang dibagi dengan total aset. Jenis industri merupakan variabel *dummy*. Jenis industri dikelompokkan menjadi 3 yaitu industri jasa, industri ekstraktif, dan industri manufaktur.

Pengujian hipotesis menggunakan uji beda t-test untuk sampel independen (*independent sample t-test*) dan *multiple regression*. Model persamaan sebagai berikut:

$$CSDI = \beta_0 + \beta_1 KM + \beta_2 KIS + \beta_3 KID + \beta_4 KA + \beta_5 \text{Etnisitas} + \beta_6 \text{Size} + \beta_7 \text{Lev} + \beta_8 \text{Profit} + \beta_9 \text{JI}_1 + \beta_{10} \text{JI}_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

CSDI = *Corporate Social Disclosure Index*

β_0 = *intercept regresi*

$\beta_{1, \dots, \beta_{16}}$ = koefisien regresi

KM = kepemilikan manajerial

KIS = kepemilikan institusional

KID = komisaris independen

KA = komite audit

Etnisitas = etnis dewan direksi

Size = ukuran perusahaan

Lev = *leverage*

Profit = profitabilitas

JI_1 = jenis industri ekstraktif

JI_2 = jenis industri manufaktur

ε = *error*

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tahun 2005

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	P-Value	Keterangan
Intersep	0,431	-	-	-
Kepemilikan Manajerial	0,006	2,253	0,036	Signifikan
Kepemilikan Institusional	0,004	2,604	0,017	Signifikan
Kepemilikan Independen	0,004	1,683	0,109	Tidak signifikan
Komite Audit	0,078	1,492	0,152	Tidak Signifikan
Etnisitas	-0,044	-0,973	0,343	Tidak signifikan
Ukuran Perusahaan (size)	-0,000	-0,553	0,587	Tidak Signifikan
Leverage	0,327	3,178	0,005	Signifikan
Profitabilitas	0,304	2,568	0,019	Signifikan
Jenis Industri 1	0,132	2,032	0,056	Tidak signifikan
Jenis Industri 2	0,069	1,487	0,156	Tidak Signifikan
R	=	0,886		
R square	=	0,785		
Adjusted R square	=	0,672		
F hitung	=	6,951		
Sig.	=	0,000		

Corporate Governance dan Etnisitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Trudy Maryona Nussy

HASIL

Jumlah sampel untuk tahun 2005 adalah 30 perusahaan dan tahun 2011 adalah 45 perusahaan. Pengujian dilakukan secara terpisah untuk tahun 2005 dan 2011. Hasil uji asumsi klasik, yaitu normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi telah terpenuhi sehingga analisis regresi layak untuk digunakan.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,672 atau 67,2% menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, etnisitas, *size*, *leverage*, dan profitabilitas, dan jenis industri yang digunakan dalam persamaan regresi secara bersama-sama dapat menjelaskan variabilitas pengungkapan CSR sebesar 67,2%. sedangkan sisanya sebesar 32,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian secara simultan melalui uji F nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit,

etnisitas, *size*, *leverage*, profitabilitas, jenis industri 1, dan jenis industri 2 akan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR.

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,514 atau 51,4% menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, etnisitas, *size*, *leverage*, dan profitabilitas, dan jenis industri yang digunakan dalam persamaan regresi secara bersama-sama dapat menjelaskan variabilitas pengungkapan CSR sebesar 51,4%, sedangkan sisanya sebesar 48,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian secara simultan melalui uji F, diperoleh signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, etnisitas, *size*, *leverage*, profitabilitas, dan jenis industri akan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan CSR.

Hasil uji beda dengan menggunakan uji t sampel tidak berpasangan untuk mengetahui

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tahun 2011

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	P-Value	Keterangan
Intersep	0,358	-	-	-
Kepemilikan Manajerial	0,001	0,720	0,476	Tidak Signifikan
Kepemilikan Institusional	0,001	2,132	0,040	Signifikan
Kepemilikan Independen	0,002	2,068	0,046	Signifikan
Komite Audit	0,062	2,299	0,028	Signifikan
Etnisitas	0,004	0,161	0,873	Tidak Signifikan
Ukuran Perusahaan (size)	0,000	0,865	0,393	Tidak Signifikan
Leverage	0,049	0,866	0,392	Tidak Signifikan
Profitabilitas	0,137	1,295	0,204	Tidak Signifikan
Jenis Industri 1	0,046	1,377	0,178	Tidak Signifikan
Jenis Industri 2	-0,013	0,530	0,599	Tidak Signifikan
R	=	0,790		
R square	=	0,625		
Adjusted R square	=	0,514		
F hitung	=	5,660		
Sig.	=	0,000		

apakah ada perbedaan CSDI tahun 2005 dan CSDI tahun 2011. Sebelum melakukan uji t, diuji terlebih dahulu homogenitas ragam sampel untuk menentukan rumus uji t yang digunakan.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada pengujian homogenitas ragam, dihasilkan nilai *p-value* sebesar 0,004 lebih kecil dibandingkan α sebesar 0,05, yang berarti bahwa ragam kedua sampel tidak homogen. Melalui hasil uji t, dapat diketahui bahwa nilai *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan α sebesar 0,05, yang berarti bahwa ada perbedaan signifikan rata-rata CSDI pada tahun 2005 dengan CSDI tahun 2011.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan CSR periode 2005 dan 2011. Berdasarkan rata-rata nilai pengungkapan CSR terlihat bahwa tingkat pengungkapan CSR periode 2011 sebesar 0,775, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengungkapan CSR 2005 sebesar 0,468. Ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Menurut Deegan (2002), salah satu alasannya adalah keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Regulasi pemerintah menjadi motif tersendiri untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah menaati peraturan yang mengatur kegiatan mereka. Produk hukum yang menjamin eksistensi CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan di bidang gas dan minyak bumi untuk melaksanakan program CSR, Undang-Undang No, 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bagi

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dilaksanakan sebagai upaya memberdayakan potensi ekonomi masyarakat sekaligus sebagai wujud kepedulian perseroan untuk bersama-sama menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Program yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan program CSR perusahaan BUMN lainnya.

Hasil penelitian membuktikan bahwa untuk tahun 2005 kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Anggraini (2006). Namun, bertentangan dengan hasil riset Huafang & Jianguo (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan akan semakin besar. Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan menyejajarkan kepentingannya dengan pemegang saham karena dampak yang timbul dari pengambilan keputusan akan langsung dirasakan. Hasil penelitian ini untuk tahun 2011 membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian Huafang & Jianguo (2007) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial pada perusahaan di China tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR karena kepemilikan manajerial yang rendah dan kepemilikan manajerial tidak mendorong manajemen untuk berperilaku lebih baik tetapi mendorong manajemen untuk mengatur posisi karyawan dalam perusahaan.

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas dan Uji Beda

Uji Homogenitas				Uji Beda			
F hitung	F tabel	P-value	Keterangan	t hitung	t tabel	P-value	Keterangan
8,898	1,79	0,004	Tidak Homogen	9,560	2,018	0,000	Berbeda

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR baik untuk tahun 2005 maupun tahun 2011, konsisten dengan hasil penelitian Said *et al.* (2009) yang membuktikan bahwa kepemilikan oleh pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR namun bertentangan dengan hasil penelitian Rawi & Muchlish (2010) dan Machmud & Djakman (2008) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh institusi akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Intervensi institusi dapat memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam laporannya sehingga pengungkapan CSR akan meningkat.

Hasil penelitian ini untuk tahun 2005 membuktikan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Said *et al.* (2009) yang membuktikan bahwa proporsi *independent director* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Dalam praktik yang selama ini terjadi di Indonesia, kedudukan direksi biasanya sangat kuat bahkan, ada direksi yang enggan untuk membagi wewenang serta tidak memberikan informasi yang memadai kepada komisaris (Effendi, 2009). Pemilihan dan pengangkatan komisaris independen yang kurang efektif sehingga komisaris independen tidak dapat menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak independen sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik akibatnya komisaris independen tidak dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait pengungkapan CSR. Untuk tahun 2011, hasil penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Huafang & Jianguo (2007) yang menemukan bahwa persentase

jumlah dewan yang independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Said *et al.* (2009). Keberadaan komisaris independen dalam dewan komisaris dapat mengawasi tindakan manajemen perusahaan dan menjamin bahwa direksi dapat membuat kebijakan yang konsisten dengan kepentingan *stakeholder*. Independensi dewan komisaris dapat mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholdernya* termasuk informasi sosial dan lingkungan. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan CSR ditunjukkan melalui pengungkapan CSR dalam laporan tahunan.

Hasil penelitian ini untuk tahun 2005 membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Said *et al.* (2009) yang membuktikan bahwa proporsi direktur non eksekutif pada komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Ho & Wong (2001) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komite audit pada suatu perusahaan berpengaruh terhadap praktik pengungkapan sukarela. Pembentukan komite audit juga bisa disebabkan karena hanya untuk memenuhi ketentuan pemerintah tanpa mempertimbangkan kompetensi komite audit. Hal ini terlihat dengan penunjukkan anggota komite audit di perusahaan publik yang sebagian besar bukan didasarkan pada kompetensi dan kapabilitas yang memadai namun lebih didasarkan pada kedekatan dengan dewan komisaris perusahaan (Effendi, 2009). Untuk tahun 2011 hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Said *et al.* (2009) dan Ho & Wong (2001). Ho & Wong, (2001) menunjukkan bahwa komite audit merupakan mekanisme pengawasan yang dapat memperbaiki kualitas arus informasi antara pemilik perusahaan dengan manajer, khususnya dalam pelaporan lingkungan (Barako *et al.*, 2006). Dengan

membantu membentuk pengendalian internal yang baik, komite audit dapat memperbaiki kualitas pengungkapan informasi termasuk informasi sosial dan lingkungan.

Terkait dengan pengaruh etnisitas terhadap pengungkapan CSR, Hasil penelitian ini untuk tahun 2005 dan 2011 membuktikan bahwa etnisitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil riset Haniffa & Cooke (2005) yang membuktikan bahwa direktur keuangan etnis Melayu tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Strategi legitimasi yang dilakukan perusahaan dapat juga dilakukan dengan mempekerjakan masyarakat di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Namun terdapat beberapa kepentingan publik yang dewasa ini cenderung diabaikan oleh perusahaan, yakni kurang memperhatikan masyarakat yang berdomisili di sekitar perusahaan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar (Effendi, 2009).

Ukuran Perusahaan (*Size*)

Penelitian ini membuktikan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Anggraini (2006) dan Roberts (1992). Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Apabila manfaat yang akan diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan, perusahaan dengan sukarela akan mengungkapkan informasi sosial sehingga besar kecilnya aset tidak memengaruhi pengungkapan CSR.

Leverage

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa untuk tahun 2005, *leverage* berpengaruh positif terha-

dap pengungkapan CSR. Hasil ini konsisten dengan temuan Barako *et al.* (2006) yakni tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Perusahaan dengan jumlah utang yang besar cenderung secara sukarela memberikan banyak informasi dalam laporan tahunan. Untuk meningkatkan kemungkinan memperoleh dana dari institusi keuangan perusahaan cenderung untuk menyajikan informasi secara rinci dalam laporan tahunan perusahaan termasuk informasi sosial dan lingkungan. Hasil penelitian ini untuk tahun 2011 membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Rawi & Muchlish (2010). Tekanan keuangan terhadap tingkat utang perusahaan akan memengaruhi pemilihan kebijakan dan strategi pengungkapan informasi. Oleh karena itu pemilihan strategi dan kebijakan untuk mengungkapkan informasi sosial yang bersifat sukarela akan dipertimbangkan secara kritis oleh perusahaan.

Profitabilitas

Hasil penelitian ini untuk tahun 2005 membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas adalah faktor yang memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan CSR. Perolehan laba yang semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Untuk tahun 2011, penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Hackston & Milne (1996) dan Anggraini (2006) yang tidak berhasil menemukan hubungan profitabilitas dengan informasi sosial perusahaan.

Seperti dinyatakan oleh O'Donovan (2002), dari sisi teori legitimasi, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini didukung dengan argumentasi bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) meng-

anggap tidak perlu mengungkapkan CSR karena perusahaan telah memperoleh kesuksesan secara finansial.

Jenis Industri

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa untuk tahun 2005 dan 2011 jenis industri tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Tipe industri pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di Malaysia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dengan argumentasi bahwa perusahaan tersebut tidak mengadopsi strategi legitimasi untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dalam kelompok industri tertentu (Haniffa & Cooke, 2005). Luas pengungkapan antar perusahaan dalam suatu industri dengan industri lainnya berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kandungan risiko yang berbeda karena setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda pula.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep CSR melibatkan tanggung jawab ke-mitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Penelitian ini menguji perbedaan tingkat pengungkapan CSR periode 2005 dan 2011. Pengujian dan analisis dilakukan untuk tiap tahun. Penelitian ini juga menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan etnisitas terhadap pengungkapan CSR.

Secara rata-rata pengungkapan CSR di Indonesia tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2005. CSR merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama *stakeholder* terkait, terutama masyarakat di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya CSR dapat dikatakan sebagai se-

buah program atau cara yang dapat digunakan untuk mengomunikasikan eksistensi perusahaan kepada masyarakat luas sehingga banyak perusahaan yang menunjukkan keseriusan mereka untuk kegiatan CSR kemudian mengungkapkannya dalam laporan tahunan.

Pengungkapan CSR tahun 2005 dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Sebaliknya, pengungkapan CSR pada tahun tersebut tidak dipengaruhi oleh komisaris independen, komite audit, dan etnisitas. Pemegang saham akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagai kebijakan yang diambil termasuk pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR merupakan aktivitas yang selalu diawasi oleh pemilik saham institusi sehingga akan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapannya. Pengungkapan CSR tahun 2011 dipengaruhi oleh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit, sedangkan kepemilikan manajerial dan etnisitas tidak memengaruhi pengungkapan CSR pada tahun tersebut. Kepemilikan institusional mampu mendorong perusahaan untuk melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR, proporsi komisaris independen serta pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia, mampu berperan penting dalam memengaruhi penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan CSR tahun 2011.

Saran

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yakni dalam menentukan etnis dewan direksi, peneliti menggunakan data sekunder, yaitu penentuan berdasarkan nama dewan direksi. Penafsiran yang subjektif dimungkinkan terjadi pada saat menentukan etnis dewan direksi. Penelitian ini tidak membedakan kepemilikan institusional oleh asing dan kepemilikan institusional oleh domestik. Perbedaan struktur kepemilikan memungkinkan

perbedaan strategi dan kebijakan pengungkapan CSR. Penelitian ini tidak mempertimbangkan kompetensi dari komite audit. Perbedaan proksi komite audit memungkinkan relevansi yang lebih kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengungkapan CSR.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan periode waktu yang berbeda dalam pengambilan sampel, misalnya menggunakan data *time series*, penentuan etnisitas dewan direksi menggunakan kuisioner atau wawancara, pembagian kepemilikan institusional menjadi kepemilikan asing dan kepemilikan domestik, komite audit sebagai bagian dari mekanisme *corporate governance* diukur melalui kompetensi setiap anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr. R. R. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, AKPM_24*.
- Barako, D.G., Hancock, P., & Izan, H.Y. 2006. Factor Influencing Voluntary Corporate Disclosure by Kenyan Companies Corporate Government. *An International Review*, 14(2): 107-125.
- Effendi, M.A. 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Universitas Diponegoro Semarang.
- Gray, R., Owen, D., & Maunders, K. 1988. Corporate Social Reporting: Emerging Trends In Accountability and The Social Contract. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1(1): 6-20.
- Haniffa, R.M. & Cooke, T.E. 2005. The Impact Of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24: 391-430.
- Hartono, J. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*, BPFE Yogyakarta.
- Ho, S.S.M. & Wong, K.S. 2001. A Study of the Relationship between Corporate Governance Structure and the Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 10(2): 139-156.
- Huafang, X. & Jianguo. Y. 2007. Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Listed Companies in China. *Managerial Auditing Journal*, 22(6): 604-619.
- Machmud, N. & Djakman, C.D. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan; Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. *Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- O'Donovan, G. 2002. Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 15(3): 344-371.
- Rawi & Muchlish, M. 2010. Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, Leverage dan Corporate Social Responsibility. *Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto, AKPM_23*.
- Roberts, R.W. 1992. Determinants of Corporate Responsibility Disclosure. *Accounting, Organizations, and Society*, 17(6): 595-612.
- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron. H. 2009. The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2): 212-226.
- Sembiring, E.R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi 8. Solo*.
- Setianto, W.A. 2012. CSR Berwajah Indonesia, Nunung Prajarto, *CSR Indonesia: Sinergi Pemerintah, Perusahaan, dan Publik*. FISIPOL UGM. Yogyakarta, 43-73.
- Utama, S. 2007. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*. www.csrindonesia.com/data/articlesother/2007. (Diakses tanggal 14 Maret 2012).